

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini belanja pegawai khususnya gaji ASN dan kegiatan honorer yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende sesuai dengan tahapan perencanaan PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, walaupun demikian masih ditemukan adanya masalah terkait pengajuan gaji ditanggal satu untuk para pegawai di BKPSDM yang terlambat karena terjadi kesalahan penginputan dan jaringan yang tidak baik sehingga terlambat untuk menerima gaji.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan belanja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende belum optimal sebagai berikut: pengelolaan belanja pegawai menunjukkan adanya perencanaan yang tidak matang dan tidak akurat dalam perencanaan kebutuhan anggaran untuk gaji ASN mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji, kesalahan dalam penganggaran atau alokasi anggaran yang tidak tepat waktu pelaksanaan

pengelolaan anggaran belanja pegawai tidak berjalan sesuai rencana, terbukti dengan keterlambatan pembayaran gaji, kesalahan dalam penginputan data pegawai serta penyesuaian kode rekening menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran gaji, keterlambatan dan tidak akurat dalam pelaporan data keuangan pegawai bisa menyebabkan masalah dalam pengelolaan belanja pegawai. Keterlambatan pembayaran gaji menunjukkan adanya masalah dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran belanja pegawai, adanya kelemahan dalam pengawasan pengelolaan belanja pegawai yang menyebabkan kesalahan dan keterlambatan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan belanja pegawai dari sub-sub bidang kepegawaian dan secara menyeluruh terhadap kinerja para pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ende sehingga kinerja para pegawai tetap terjaga.